

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini globalisasi telah masuk dan berkembang di semua region, termasuk Asia Tenggara. Sejak pembentukan ASEAN, Hubungan Internasional di Asia Tenggara telah berlangsung di dua tingkat, yakni tingkat bilateral negara ke negara dan tingkat multilateral ASEAN. Seperti yang dikatakan Rupert Emerson, seorang pelopor dalam studi politik negara-negara pasca-kolonial yang baru merdeka, ketika bangsa telah diambil sebagai ukuran negara, tujuan kebijakan pasti menjadi promosi kepentingan nasional, sehingga dibutuhkan dinamika hubungan yang baik antar negara dan region (Weatherbee, 2009).

Bagi para ahli teori konstruktivis, globalisasi dibentuk dalam berbagai cara, terutama karena teori tersebut menawarkan sebuah peluang yang sangat nyata, misalnya, untuk menciptakan gerakan-gerakan sosial dan hak asasi manusia lintas-nasional yang dibantu oleh bentuk-bentuk komunikasi teknologi modern, seperti internet. Sedangkan menurut feminis liberal, globalisasi merupakan dampak positif dan penuh harapan, dengan melihatnya sebagai cara untuk memasukkan lebih banyak perempuan ke dalam sistem politik dan ekonomi yang ada. Yang lain jauh lebih skeptis, menunjuk pada efek negatif neoliberalisme dan globalisasi ekonomi pada kesenjangan kekayaan global, yang memiliki efek negatif yang tidak proporsional pada perempuan, terutama perempuan kulit berwarna. Menurut John, Steve & Patricia (2020) globalisasi adalah proses sejarah yang ditandai dengan:

- a. Merentangnya berbagai aktivitas sosial, politik, dan ekonomi melintasi batas-batas nasional, sehingga peristiwa, keputusan, dan tindakan di satu wilayah dunia berpotensi berdampak langsung dan tidak langsung pada individu, komunitas, dan negara-negara di wilayah yang jauh di dunia;
- b. Intensifikasi, atau semakin besarnya, keterkaitan di hampir setiap bidang kehidupan modern, dari ekonomi hingga ekologi; dan

- c. Laju arus dan proses global yang semakin cepat seiring dengan meningkatnya kecepatan peredaran ide, berita, barang, informasi, modal, dan teknologi di dunia.

Saat ini, urusan manusia tidak lagi diatur hanya dalam skala teritorial lokal atau nasional, tetapi juga semakin terorganisir dalam skala transnasional, regional, dan global. Tema lintas atau non-disiplin seperti gender, kesehatan, kemiskinan dan lingkungan juga telah mempengaruhi dimensi globalisasi. Pada gilirannya studi globalisasi telah mengambil tema-tema ini untuk menghasilkan laporan yang lebih spesifik, antara lain, migrasi, pandemi, ketidaksetaraan dan kekerasan di dunia kontemporer (Axford, 2013).

Sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang turut serta dalam peristiwa kolonialisasi, Filipina merupakan salah satu negara yang menyerap banyak aspek globalisasi dalam membenahi negaranya pasca-kolonialisasi, terutama terkait dengan kondisi ekonomi dan sosial negara tersebut, terdapat banyak guncangan yang membuat Filipina membutuhkan waktu yang lama untuk bangkit dari keterpurukan pasca-kolonialisasi. Salah satu pembuktiannya ialah kemiskinan dan ketidaksetaraan telah menjadi tantangan berulang di Filipina dan muncul kembali setelah krisis keuangan global saat ini dan kenaikan harga pangan, bahan bakar, dan komoditas yang dialami pada tahun 2008.

Filipina masih tertinggal dalam memenuhi target akses pendidikan dasar, angka kematian ibu, dan akses layanan kesehatan reproduksi (ADB, 2009). Dalam hal gender, Filipina telah membuat kemajuan substansial dalam meningkatkan peluang dan kesejahteraan perempuan dan laki-lakinya, namun tantangan tetap ada dalam menerapkan kebijakan utama dan meningkatkan kesehatan ibu dan perawatan kesehatan reproduksi.

Selain itu, ada berbagai jenis kemiskinan. Kemiskinan dapat bersifat kronis (atau antargenerasi) atau sementara. Kemiskinan juga merupakan kondisi yang dinamis. Tidak semua dari sekitar 25 juta orang Filipina yang miskin pada suatu waktu selalu miskin atau akan tetap miskin. Masyarakat miskin kronis cenderung adalah mereka yang tidak memiliki tanah, berpendidikan sangat rendah dan memiliki sedikit keterampilan, serta lanjut usia. Kemiskinan juga terjadi karena

ketidakamanan pekerjaan, lonjakan harga pangan dan komoditas, krisis kesehatan, bencana alam, serta konflik negara.

Dan terakhir, kemiskinan yang meluas adalah produk dari pembuatan kebijakan yang didominasi elit selama beberapa dekade yang telah mengabaikan atau merusak kepentingan orang miskin. Meskipun menulis tentang demokrasi Barat yang lebih kaya, pengamatan David Brady juga berlaku untuk Filipina. Ia menyatakan bahwa pada akhirnya, kemiskinan adalah konsekuensi dari kegagalan masyarakat untuk secara kolektif mengambil tanggung jawab untuk memastikan keamanan ekonomi warganya (Thompson & Batalla, 2018).

Dari tahun 2006 hingga 2015, kemiskinan menurun dari 26,6 persen pada tahun 2006 menjadi 21,6 persen pada tahun 2015, karena faktor-faktor seperti perluasan pekerjaan di luar pertanian, transfer pemerintah, khususnya kepada orang Filipina miskin yang memenuhi syarat melalui Program *Pantawid Pamilyang Pilipino*, dan pengiriman uang (The World Bank, 2018). Namun pada tahun yang sama, sekitar 22 juta orang Filipina, yang mana lebih dari seperlima populasi masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Hambatan untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang lebih cepat, termasuk pola pertumbuhan yang kurang berpihak pada masyarakat miskin; ketimpangan pendapatan dan kesempatan yang tinggi; serta dampak buruk dari bencana alam dan konflik.

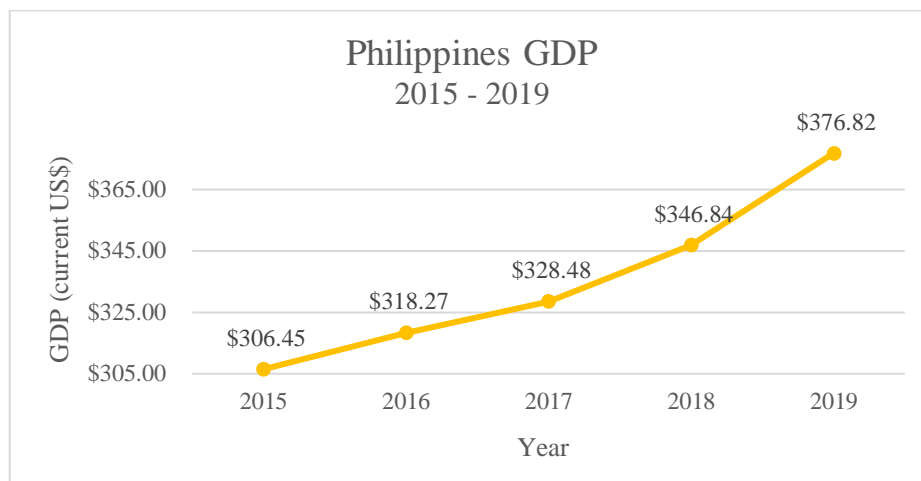
Pemerintah secara domestik telah menyiapkan rencana strategis yang berfokus pada pengurangan kemiskinan, khususnya *AmBisyon Natin 2040*, visi jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kehidupan segmen penduduk termiskin, dan Rencana Pembangunan Filipina 2017–2022. Rencana-rencana ini menargetkan pengurangan kemiskinan menjadi 13 hingga 15 persen pada tahun 2022. Untuk membantu mencapai target-target ini, beberapa rekomendasi kebijakan ini mencakup (The World Bank, 2018):

- a. Menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak;
- b. Meningkatkan produktivitas di semua sektor, terutama pertanian;
- c. Melengkapi orang Filipina dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk ekonomi abad ke-21;
- d. Berinvestasi dalam kesehatan dan nutrisi;

- e. Memfokuskan upaya pengentasan kemiskinan di Mindanao; dan
- f. Mengelola risiko bencana dan melindungi yang rentan.

Sementara itu, tingkat pengangguran diperkirakan sebesar 5,7% pada tahun 2017, yang merupakan salah satu tingkat terendah yang tercatat sejak tahun 2005. Namun, meskipun terdapat tren penurunan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam beberapa tahun terakhir, setengah pengangguran tetap tinggi, yang diperkirakan sebesar 16,1% pada tahun 2017 (Reyes, et al., 2019). Berdasarkan jenis kelamin, tingkat pengangguran pria dan wanita masing-masing berada pada 5,4 dan 5,1 persen (United Nations, 2019). Terlihat bahwa terdapat kemajuan yang signifikan dalam mengurangi tingkat setengah pengangguran di negara ini.

Grafik 1: GDP Filipina Periode 2015-2019



Sumber: (The World Bank, 2021)

Jika dilihat melalui grafik di atas, GDP Filipina meningkat cukup signifikan dari tahun ke tahunnya. Bahkan di tahun 2019, memperoleh nilai yang cukup melonjak sebesar 376,823 Billion US\$. Selibhnya pada tahun-tahun berikutnya GDP tetap meningkat dengan perlahan. Pada tahun 2015 ialah 306,446 Billion US\$, tahun 2016 bernilai 318,267 Billion US\$, tahun 2017 memperoleh 328,481 Billion US\$, dan tahun 2018 mendapatkan 346,842 Billion US\$. GDP merupakan salah satu indikator dalam penilaian kemiskinan di suatu negara, karena hal ini juga terkait dengan tenaga kerja di Filipina.

Meskipun demikian, perlu digarisbawahi bahwa kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, tidak ada solusi tunggal atau sederhana, sehingga kemiskinan memerlukan perubahan pada berbagai kebijakan dan institusi. Kemiskinan di Filipina paling baik dipahami dalam tiga karakteristik mendasar, yakni kegigihannya; kompleksitasnya; dan akarnya dalam kebijakan yang merugikan orang miskin. Dua ciri kemiskinan yang paling mencolok di Filipina adalah bahwa (Reyes, et al., 2019):

- a. Tingkat kemiskinan saat ini sekitar 22 persen, sehingga dapat dikatakan masih tergolong tinggi untuk negara berkembang berpenghasilan menengah ke bawah; dan
- b. Meskipun pertumbuhan ekonomi makro sedang sangat berkembang dalam beberapa dekade terakhir, fenomena kemiskinan hanya sedikit menurun dan baru-baru ini saja (belum menyeluruh).

Sebelumnya, Filipina adalah negara kepulauan dengan lebih dari 7.100 pulau, dengan garis pantai yang membentang 10.850 mil. Kepulauan ini terletak di lepas pantai tenggara daratan Asia antara Kalimantan dan Taiwan. Dikelilingi di barat oleh Laut Cina Selatan, di timur oleh Samudra Pasifik, di selatan oleh Laut Sulu dan Sulawesi, dan di utara oleh Selat Bashi. Negara ini terdiri dari tiga wilayah utama, yakni Luzon, pulau terbesar di utara; Visayas, kelompok pulau di tengah; dan Mindanao, pulau terbesar di selatan.

Dengan keadaan pantai yang tidak teratur, aluvial dataran, lembah sempit, dan pegunungan yang membentang dari utara ke selatan, negara ini pun rawan terhadap bencana alam. Bencana terburuk yang tercatat terjadi pada Juni 1991, ketika Gunung Pinatubo, di pusat Luzon, meledak, menyebabkan kehancuran yang meluas. Karena Filipina adalah bagian dari Asia Tenggara, orang Filipina kebanyakan adalah orang Melayu. Etnis minoritas yang paling signifikan adalah orang Tionghoa, dan karena perkawinan campuran, banyak orang Filipina memiliki keturunan Tionghoa. Juga, kolonisasi pulau-pulau oleh Spanyol (1565-1898) dan Amerika (1898-1946) telah mempengaruhi perkembangan masyarakat dan budaya Filipina.

Terdapat sekitar 78 bahasa lisan yang berbeda dan 500 dialek di seluruh nusantara, semuanya termasuk dalam rumpun bahasa Melayu-Polinesia. Meskipun mayoritas orang Filipina dapat berbicara dalam bahasa nasional—Tagalog, atau Pilipino—dan mereka memiliki identitas nasional yang sama, setiap kelompok yang berbeda cenderung mengidentifikasi diri dengan kelompok bahasa utama tempat mereka berasal. Lebih dari 60 persen populasi Kristen Asia tinggal di Filipina, dan jumlah mereka terus meningkat. Sedangkan kelompok minoritas agama terbesar adalah populasi Muslim. Perkiraan populasi Muslim berkisar antara 3,9 juta hingga 7 juta, atau 5 hingga 9 persen dari populasi (Nadeau, 2008).

Namun semua identitas negara tersebut tidak semata-mata terbentuk oleh bangsa Filipina. Karena bagaimanapun juga nasionalisme bukanlah hasil yang otomatis, sebab nasionalisme merupakan program politik yang tujuannya tidak hanya untuk memuji, membela, atau memperkuat suatu bangsa, tetapi secara aktif untuk membangunnya, serta menuangkan aspirasi manusia ke dalam bentuk yang secara fundamental baru. Nasionalisme memberikan rasa identitas, yang mungkin tidak dipilih secara rasional atau diberikan secara bawaan, tetapi sebagian besar dibangun secara tidak sadar atau intuitif sebagai prinsip yang dijalankan manusia di dalamnya (Tarling & Gomez, 2008).

Bahkan di pertengahan abad kedua puluh, beberapa sarjana masih mengatakan bahwa Filipina adalah negara yang masih mencari identitas nasional. Identitas dikonstruksikan sesuai dengan kondisi khusus dari proses waktu dan bergantung pada ruang dan waktu. Pengertian identitas sejarah berarti tidak hanya penempatan unit identitas dalam proses sejarah, tetapi juga mengubah karakter komprehensif dan holistik dari setiap unit identitas umum yang diberikan dalam perspektif sejarah.

Identitas sosial dan budaya dapat dikelompokkan dalam dua kategori, sebagai identitas diberikan dan diperoleh (İnaç & Ünal, 2013). Keluarga, kelompok etnis, masyarakat, komunitas, bangsa, dan peradaban adalah identitas yang diberikan dan diciptakan dalam proses sosialisasi. Mereka eksklusif karena karakter bawaan mereka. Namun, identitas yang dipilih oleh kehendak bebas individu adalah identitas yang diperoleh. Sebaliknya, intervensi negara modern membentuk

konstruksi identitas nasional, artinya identitas negara menentukan identitas sosial, dengan cara yang sama, dan berbasis kebangsaan, agama, etnis serta kelas yang memiliki dampak besar dalam membentuk identitas lain.

Dengan kata lain, nasionalisme dan identitas nasional tidak selalu reaksioner atau progresif secara politik. Identitas nasional selalu merupakan kompleks pergulatan dan pengalaman sejarah yang terus bergeser dan tidak terselesaikan yang dibuahi, diproduksi, dan diterjemahkan melalui berbagai budaya. Güvenç mendefinisikan identitas nasional sebagai semacam pengolahan cara sosialisasi yang mengambil bagian dalam individu dalam komunitas tertentu, atau rasa kepemilikan kelompok mana pun melalui akulturasi.

Seperti yang sudah dijelaskan secara teoretis mengenai identitas nasional, Filipina mengalami goncangan bahkan krisis identitas bangsa mereka akibat dari kolonialisasi Spanyol. Dimulai ketika Spanyol membawa serta Gereja Katolik Roma, yang berperan penting dalam mendirikan pemerintahan kolonial atas negara jajahannya. Penjajahan Spanyol di Filipina adalah peristiwa sejarah yang signifikan pada abad keenam belas. Kolonisasi dan Kristenisasi secara paksa mengubah arah perkembangan sejarah Filipina.

Proses penjajahan Spanyol memiliki efek disintegrasi pada ekonomi politik pribumi. Spanyol mengganggu nilai-nilai tradisional, praktik komunal, dan hubungan sosial dengan melembagakan struktur kelas baru yang melayani kepentingan kolonial dan yang merusak ekonomi perdagangan maritim yang sudah ada sebelumnya. Mereka membawa serta mode produksi feodalistik yang merestrukturisasi perdagangan dan tenaga kerja. Pada periode ini juga terbentuk awal mula kesetaraan status laki-laki dan perempuan menjadi sangat vertikal di Filipina.

Dalam masyarakat Filipina pra-kolonial, *babaylan* atau *shaman* (biasanya perempuan atau laki-laki feminin) adalah representasi utama dari status yang diberikan kepada perempuan di *balangay* atau *barangay* (Hega, Alporha, & Evangelista, 2017, p. 1). *Babaylan* sebagian besar berkaitan dengan budaya, agama, kedokteran, dan pengetahuan teoretis lainnya yang penting bagi perilaku

masyarakat Filipina pra-kolonial. Salazar menyebut *babaylan* sebagai ilmuwan proto di antara orang Filipina kuno.

Babaylan tidak tunduk pada datu, yang dianggap sebagai anggota klan yang paling kaya, terkuat, paling bijaksana, dan sering kali paling berani, sehingga sering menjadi kepala dalam komunitas tertentu. Karena *babaylan* dipandang sebagai tokoh masyarakat yang dihormati, mereka bersama datu banyak melaksanakan kegiatan sosial dalam lingkungannya. *Babaylan* mempunyai pengetahuan spiritual yang mumpuni, sehingga mereka sering memimpin ritual dalam hal panen pertanian. Dalam bidang astronomi, mereka juga memahami mengenai penentuan waktu siklus panen, hal inilah yang membuat masyarakat makin menghargai keberadaan *babaylan* di Filipina. Terakhir, *babaylan* juga berperan sebagai *healer* atas keterampilan mereka dalam ilmu kedokteran. Dengan demikian, *babaylan* bukan hanya seorang pendeta atau tokoh budaya, tetapi juga seorang tabib masyarakat.

Fungsi vital yang dipenuhi oleh peran perempuan tradisional melalui *babaylan*, menjadikan mereka memiliki posisi yang kuat dan terdandang dalam hal sosial dan budaya di masyarakat Filipina pada saat pra-kolonial Spanyol. Namun sejak kedatangan Spanyol, status *babaylan* berubah secara drastis, karena mereka dan filosofi mereka dipandang sebagai kutukan bagi keyakinan agama penjajah dan oleh karena itu harus diberantas demi iman Kristen. Tidak hanya itu, status perempuan juga turut direndahkan sejak kolonialisasi Spanyol. Para biarawan Spanyol memberikan *babaylan* stigma sebagai sekumpulan orang yang memiliki ilmu hitam kepada masyarakat Filipina. Indoktrinasi Kristen yang agresif membuat para biarawan mengawasi keyakinan agama dan spiritual perempuan di Filipina.

Selama Perang Dunia Kedua, perempuan Filipina menjadi sasaran kejahatan perang. Beberapa dari mereka menjadi perempuan penghibur dan menjadi korban, bukan hanya pemerkosaan, tetapi kejahatan yang lebih berat dari perbudakan seksual. Fenomena ini merupakan salah satu kasus pemerkosaan sistematis terburuk yang dialami perempuan pada masa perang. Dari sinilah terbentuk berbagai gerakan dan komunitas dalam rangka memperjuangkan hak perempuan di Filipina.

Misalnya MAKIBAKA yang didirikan pada Juli 1969 dengan tujuan menempatkan pembebasan perempuan dalam konteks perjuangan melawan dominasi asing dan penindasan kelas. Dilanjutkan dengan KABAPA, PILIPINA, KALAYAAN, serta yang terkenal ialah GABRIELA atau Majelis Umum Pengikat Perempuan untuk Reformasi, Integritas, Kesetaraan, Kepemimpinan, dan Aksi dalam memperjuangkan hak dan status perempuan di Filipina (Hega, Alporha, & Evangelista, 2017, p. 3).

Ketika Fidel Ramos menjadi presiden Filipina pada tahun 1992, ia berangkat untuk meningkatkan posisi ekonomi dan strategis negara itu di Asia dan untuk memulihkan reputasinya sebagai negara yang demokratis dan berkembang. Di bawah Ramos, apa yang baik untuk bangsa dimulai dengan apa yang baik untuk ekonomi, dan pengakuan internasional menjadi elemen kunci dalam imajinasi nasional. Selanjutnya Presiden Ramos menandatangani Undang-Undang Pekerja Migran dan Orang Filipina Luar Negeri tahun 1995 yang akhirnya menyatakan bahwa pemerintah tidak lagi mempromosikan pekerjaan di luar negeri sebagai sarana untuk mempertahankan pertumbuhan dan mencapai pembangunan nasional, hal ini dilakukan sebagai wujud kebebasan hak untuk memilih kehidupan bagi orang-orang Filipina.

Mengenai hal kesetaraan hak perempuan, di bidang advokasi legislatif, salah satu contohnya anggota serikat pekerja perempuan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengesahan Undang-Undang Republik 7877 atau Undang-Undang Anti Pelecehan Seksual tahun 1995. Undang-undang penting ini terus mempengaruhi kode etik di tempat kerja dan advokasi serikat pekerja untuk meningkatkan cakupannya. Hingga pada akhir tahun 1998, pemerintah Filipina secara terbuka mendukung seruan Dr. Mohamed Mahathir untuk meninjau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Semangat dan konsistensi masyarakat Filipina terkait HAM terus ditegakkan dari waktu ke waktu.

Walaupun begitu, kesetaraan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK) terus-menerus lebih rendah daripada TPAK laki-laki, dengan selisih 28%-32% sejak tahun 1998 meskipun lapangan kerja perempuan meningkat dari tahun ke tahun (Hega, Alporha, & Evangelista, 2017, p. 10). Mayoritas pekerja

perempuan tetap terkonsentrasi pada pekerjaan bergaji rendah dan berstatus lebih rendah di sektor formal, mungkin karena ini adalah satu-satunya jenis pekerjaan yang tersedia bagi mereka atau satu-satunya pekerjaan yang memungkinkan mereka menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan keluarga.

Dalam strategi pengorganisasian, kebutuhan untuk memajukan kesetaraan gender dalam gerakan buruh berkontribusi dalam pembentukan MAKALAYA pada tahun 1998, yang dimulai sebagai forum pekerja perempuan. Dengan efek kontemporer globalisasi, khususnya migrasi tenaga kerja ke luar negeri yang berkembang, dapat terlihat rasa identitas nasional Filipina yang dihidupkan kembali tetapi juga sangat berubah. Migrasi tidak hanya menghilangkan pengalaman lokal, namun juga membuatnya mengubah orientasi perspektif nasional.

Orang Filipina semakin menemukan diri mereka menemukan akar etnis mereka di tempat asing. Selain itu, perpecahan lama sedang terkikis atau didefinisikan ulang sebagai hambatan kelas, etnis, gender dan agama dialami di bawah kondisi baru dan di lokasi yang berbeda. Sementara identitas Filipina tidak pernah sederhana atau homogen, sekarang jauh lebih kompleks dan bermasalah di akhir abad kesembilan belas.

Realitas yang semakin kompleks diciptakan oleh imperatif ekonomi dan budaya dari globalisasi semakin sulit, bahkan bagi nasionalis akhir abad kedua puluh untuk mencerna dan bekerja ke dalam analisis politik kontemporer. Lebih buruk lagi, itu secara bersamaan mendistorsi apa yang dimaksud dengan nasionalisme, sehingga di bawah rezim Ramos, nasionalisme tidak lagi mempertahankan kedaulatan, tetapi sebenarnya erosi untuk memberi jalan kepada transnasionalisasi atau peningkatan penetrasi modal global.

Filipina memiliki tingkat melek huruf yang tinggi, kecakapan berbahasa Inggris yang tersebar luas, serta tenaga kerja terdidik yang membuat orang Filipina sangat kompetitif di luar negeri. Hal itu menghasilkan 988.615 orang Filipina yang dikerahkan untuk bekerja di luar negeri di lebih dari 180 negara pada tahun 2005 (Nadeau, 2008). Ekspor tenaga kerja Filipina berjenis kelamin perempuan Filipina di luar negeri sangat terkonsentrasi pada pekerjaan tidak terampil dan pekerjaan jasa, seperti buruh dan pekerja rumah tangga. Pola ini menambah bukti bagaimana

Filipina diposisikan dalam pembagian kerja global yang semakin tergender dan rasial. Jumlah total OFWs diperkirakan mencapai 2,3 juta pada tahun 2014. Aliran masuk remitansi ke negara itu terus meningkat dalam empat dekade terakhir. Rata-rata, remitansi merupakan 10-11 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara (Tanyag, 2017).

Pada tahun 2014 saja, OFWs mengirim kembali 173,2 miliar peso (atau sekitar US\$4 miliar). Memang, pengiriman uang Filipina telah diamati lebih stabil daripada aliran keuangan lainnya di negara itu sejak tahun 1996, dan telah melampaui investasi langsung asing (FDI) dan bantuan pembangunan resmi (ODA) (Tanyag, 2017). Di tahun yang sama, para perempuan ini mengirim kembali 24,3 miliar peso atau 19,2 persen dari total pengiriman uang ke negara tersebut. Sebagai buruh murah, apa yang ditunjukkan oleh bukti ini adalah bahwa mereka mengirimkan bagian yang lebih besar dari pendapatan mereka dengan sedikit sisa untuk konsumsi pribadi mereka, sehingga merugikan kesejahteraan mereka.

Salah satu *concern* lain menyatakan bahwa sejarah juga memunculkan sebuah bukti, bahwa apa yang selama ini ditafsirkan sebagai sejarah Filipina hanyalah sejarah laki-laki, sedangkan sejarah perempuan ditutupi, dihapus dan dibuat tidak terlihat. Ketergantungan historiografi tradisional pada dokumen-dokumen yang ditulis oleh sumber-sumber yang melek huruf, pandai berbicara, berwibawa, dan sebagian besar laki-laki telah menciptakan sejarah patriarki, khususnya revolusi.

Prestasi perempuan dianggap lebih sebagai tugas domestik dan lebih sedikit keinginan patriotik dan yang menyerahkannya terutama untuk murni peran pendukung sebagai istri, saudara perempuan, ibu atau anak perempuan. Salah satu kontribusi perempuan yang paling menonjol, tetapi sering tidak diperhatikan dalam revolusi dapat ditemukan di bidang sastra. Mereka menerbitkan puisi dalam publikasi revolusioner, seperti *El Heraldo de la Revolucion* dan *La Independencia* (Hega, Alporha, & Evangelista, 2017, p. 2). Ini menyiratkan bahwa kontribusi perempuan dalam revolusi tidak hanya logistik tetapi juga intelektual.

Karena permintaan yang lebih tinggi, perempuan migran terkonsentrasi di pekerjaan rumah tangga dengan perkiraan terbaru menunjukkan bahwa perempuan menyumbang 73,4% dari semua pekerja rumah tangga migran di seluruh dunia.

Pengakuan dan pelebagaan formal tersebut semakin diperkuat melalui penerbitan *CHED Memorandum Order (CMO) No. 1, Tahun 2015*, yang mengatur fokus gender secara nasional di semua lembaga pendidikan tinggi, swasta dan negeri (Hega, Alporha, & Evangelista, 2017, p. 16). Dengan CMO, Filipina adalah satu-satunya negara di dunia atau yang pertama melakukan dan menyebarluaskan pengarusutamaan gender di dunia akademis.

Komisi Centennial Nasional-Sektor Perempuan (NCC-WS) dibentuk untuk mempromosikan kesadaran yang lebih besar dari kegiatan perempuan ini, mengadopsi lambang KKK revolusioner yang terkenal untuk tujuan mereka sendiri sebagai *Kababaihan, Kasaysayan, Kalayaan* (Perempuan, Sejarah, Kebebasan). NCC-WS juga menyelenggarakan serangkaian lokakarya seminar di mana para peserta diajak untuk mendekonstruksi historiografi tradisional yang telah meminggirkan sudut pandang perempuan, kelas bawah, non-kulit putih dan efek penjajahan.

Namun, Spanyol tidak pernah mampu menekan pola budaya yang sudah lama mapan. Dengan melihat interaksi kompleks antara aspek terkait, dapat terlihat beberapa faktor yang membantu membentuk negara bangsa Filipina modern. Filipina merupakan kasus yang menarik untuk isu ini dengan beberapa alasan. Hal ini menjadi kasus representatif yang ideal karena merupakan negara pasca-kolonial tertua di Asia Tenggara, yang melibatkan pembebasan nasional dan memiliki pengalaman terlama dengan lembaga-lembaga demokrasi liberal.

Migrasi perempuan telah menyebabkan peningkatan kontrol mereka atas keputusan domestik, akses ke pekerjaan berupah, dan partisipasi yang lebih besar di ruang publik. Namun, keuntungan tersebut terus terhenti oleh struktur perpotongan pasar tenaga kerja lokal dan global, ideologi gender tradisional keluarga, dan ketidaksetaraan ras dan gender dalam pendidikan global.

Di bawah globalisasi ekonomi, migrasi mandiri perempuan menjadi gerakan dari satu sistem ketidaksetaraan gender ke sistem lainnya. Sementara migrasi tenaga kerja perempuan mungkin memberi mereka mobilitas ekonomi, segmentasi gender dan ras di pasar tenaga kerja global memosisikan perempuan sebagai pekerja tidak tetap. Demikian pula, menelisik hal ini, pembentuk rumah tangga transnasional

belum sepenuhnya membebaskan perempuan dari tanggung jawab pengasuhan mereka dalam keluarga.

Sebaliknya, ibu transnasional semakin terbebani dengan peran ganda, yaitu mencari nafkah dan merawat keluarga mereka dari jauh. Akhirnya, perempuan mengejar migrasi pendidikan untuk mengurangi diskriminasi gender di pasar tenaga kerja negara asal mereka dan melarikan diri dari struktur patriarki yang membatasi subjektivitas mereka, hanya untuk menemukan diri mereka sebagai orang lain yang dirasikan di negara tuan rumah (Choi, Hwang, & Parreñas, 2018).

Pekerja migran juga mempengaruhi dinamika kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di masa lalu. Filipina di tingkat mikro menghasilkan remitansi yang tidak hanya dapat mengubah tingkat kehidupan sehari-hari anggota keluarga, tetapi mengubah posisi status mereka di kota atau desa setempat. Dan pada tingkat makro, mereka tidak hanya sangat meningkatkan GNP melalui remitansi tersebut, tetapi juga mempengaruhi pandangan tentang jenis citra yang dimiliki orang Filipina di luar negeri.

Kesadaran bahwa pekerjaan di luar negeri tampaknya menawarkan solusi terbaik untuk masalah kemiskinan di Filipina pada saat krisis ekonomi, bahkan hingga saat ini. Defisit neraca pembayaran yang kronis, pengangguran, kemiskinan, dan ancaman konflik politik yang berkepanjangan sangat terbantu melalui penyumbangan remitansi tersebut. Pemerintah melihat potensi negara dalam angkatan kerjanya yang berpendidikan tinggi, tetapi sebagian besar menganggur atau setengah menganggur. Yang terpenting, Filipina secara signifikan mengurangi defisit neraca pembayarannya melalui remitansi pendapatan yang substansial dari para migrannya.

Peneliti menjabarkan beberapa poin penting penelitian terdahulu terkait dengan topik ini. Pengelompokan pertama ialah penelitian dalam topik **gender**. Pertama, Pacoy (2013) menjelaskan bahwa Filipina menonjol sebagai model perintis upaya dalam mengarusutamakan perspektif gender ke dalam politik dan pemerintahan. Upaya pengarusutamaan menegaskan kesetaraan gender sebagai tujuan mendasar dari keputusan kebijakan yang luas, struktur kelembagaan, dan alokasi sumber daya. Akibatnya, Undang-Undang Republik 7192 atau dikenal sebagai “UU

Perempuan dalam Pembangunan dan Pembangunan Bangsa” mengamanatkan lembaga-lembaga untuk mengalokasikan sumber daya untuk pengarusutamaan gender termasuk pelembagaan mekanisme yang memungkinkan dan sistem informasi, serta ketersediaan *database* gender.

Perempuan juga sering disebut kurang memiliki akses terhadap informasi tentang migrasi atau peluang kerja, saluran rekrutmen, dan seringkali kurang memiliki persiapan dibandingkan laki-laki untuk menghadapi kondisi kerja dan kehidupan di negara tujuan (Tigno, 2014). Sedangkan pemikiran lainnya percaya bahwa migrasi perempuan merusak tatanan sosial dan moral masyarakat Filipina karena keluarga dibiarkan tanpa istri dan ibu. Tampaknya pasar migrasi yang didorong oleh permintaan, dengan keterlibatan agen perekrutan swasta, dan difasilitasi oleh negara migrasi, menjerumuskan perempuan ke dalam ideologi domestikitas dan inferioritas yang memungkinkan eksploitasi terus-menerus. Bahkan ironisnya, mereka ditandai sebagai pahlawan modern dari Filipina.

Lebih lanjut, Patricia Cortes (2015) menyatakan bahwa terdapat 1,5–3 juta anak Filipina dengan orang tua yang tinggal di luar negeri. Sebagian besar orang tua yang pergi melakukannya untuk membiayai anak-anak dan keluarga mereka. Namun, kesejahteraan anak-anak tidak hanya bergantung pada sumber daya ekonomi, tetapi juga pada pengasuhan orang tua. Sebuah survei oleh Pusat Migrasi Scalabrini Manila terhadap 700 anak usia sekolah menunjukkan bahwa dibandingkan dengan teman sekelas mereka, anak-anak pekerja migran berprestasi sangat buruk di sekolah, dan lebih cenderung mengekspresikan kebingungan, kemarahan, serta apatis. Di negara-negara di mana peran gender masih sangat kaku dan peran utama ibu adalah membesarkan anak dan peran utama ayah adalah sebagai pencari nafkah, migrasi ibu dianggap sebagai gangguan yang jauh lebih besar dalam kehidupan anak daripada ketidakhadiran ayah.

Dan terakhir dalam topik ini, Jean Encinas-Franco (2016) menjelaskan lebih lanjut mengenai feminisme di Filipina yang saat ini disebut oleh badan-badan pembangunan internasional sebagai negara yang secara substansial telah membuat kemajuan dalam hal kesetaraan gender. Hal ini dikatakan sebagai bahan perdebatan mengingat persilangan gender dengan faktor-faktor seperti ras, kelas, dan etnis,

terutama dalam konteks Filipina. Dengan hanya sekitar 40% perempuan Filipina dalam pekerjaan yang dibayar, dan tingkat partisipasi politik perempuan di bawah standar internasional, negara ini memang memiliki jalan panjang untuk mencapai tujuan kesetaraan gendernya.

Selanjutnya ialah mengenai penelitian dalam topik **kemiskinan**. Filipina terus mengalami tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh koefisien GINI negara yang tinggi sebesar 0,43. Pemerintah menggunakan ide-ide Filipina tentang feminitas, domestikitas, dan kekerabatan yang mempengaruhi proses pengadaan dan perekrutan migrasi transnasional dan untuk membuat kebijakan yang mengatur migrasi perempuan. Dari tahun 1981 hingga 2011, sekitar 1,8 juta orang Filipina telah bermigrasi ke seluruh dunia untuk mencari pekerjaan. Peningkatan tenaga kerja di luar negeri berasal dari ketidaksetaraan struktural historis kelas dan gender, masalah ekonomi domestik, dan ketidaksetaraan pendapatan yang menciptakan lebih banyak kemiskinan dan ketidakstabilan di Filipina (Mohyuddin, 2017).

Kemiskinan feminisasi sering dikaitkan dengan feminisasi kepala rumah tangga di daerah berkembang. Tercatat bahwa kekepalaan perempuan dengan cepat menjadi wacana yang diterima tentang gender dan kemiskinan di lembaga-lembaga internasional. Akibatnya, ukuran rata-rata rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan (FHH) yang biasanya lebih kecil memberi mereka visibilitas yang lebih besar dalam statistik kemiskinan. Pengentasan kemiskinan kemudian dilihat sebagai hasil atau indikator kemajuan pemberdayaan perempuan. Meskipun tidak bekerja secara langsung untuk mengurangi kemiskinan, mereka bekerja untuk mengukur kemajuan dalam kesejahteraan perempuan, termasuk perubahan dalam kemiskinan gender (Bradshaw, Chant, & Linneker, 2017).

Namun berdasarkan data yang ada, San Juan dan Agustin (2019) menemukan bahwa statistik kemiskinan resmi tahun 2015 yang dirilis oleh Otoritas Statistik Filipina (PSA), sebuah keluarga yang terdiri dari 5 orang membutuhkan setidaknya 9.064 peso (US \$ 174) untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok dan non-makanan setiap bulan, di mana 6.329 peso (US\$122) dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar, yang hanya memungkinkan 2.735 peso (US\$53) untuk

kebutuhan non-makanan. Jumlah yang menyedihkan untuk kebutuhan non-makanan tersebut tidak akan mencakup semua item yang disebutkan. Harus dicatat bahwa kategori barang non-makanan esensial pemerintah Filipina tidak termasuk barang apa pun yang terkait dengan rekreasi atau hiburan. Kisah hidup yang tak terhitung jumlahnya tentang ketidakpuasan globalisasi, masih menjadi mayoritas kisah hidup warga yang terpinggirkan, yang hidupnya tidak didokumentasikan oleh statistik terbatas pemerintah.

Dan terakhir, peneliti menjabarkan mengenai penelitian terdahulu dalam topik **migrasi dan pekerja migran**. Maria Tanyag (2017) menjelaskan isu ini melalui *Depletion through Social Reproduction* (DSR) untuk mengungkapkan bagaimana pekerjaan reproduksi sosial dimanfaatkan untuk melayani aktivitas ekonomi dengan mengorbankan hak atas integritas tubuh dengan bantuan ideologi fundamentalis agama yang (kembali) menuliskan wacana perempuan altruisme seperti ideal “ibu yang rela berkorban”. Dalam kasus Filipina, ketergantungan ekonomi yang jelas pada tenaga kerja reproduktif sosial perempuan terutama dalam hal pengorbanan gender yang diharapkan dari mereka diperparah dengan memburuknya kondisi kesehatan reproduksi. Ini termasuk pembatasan ketat dalam mengakses alat kontrasepsi dan kriminalisasi aborsi di negara tersebut.

Bagaimanapun juga, pekerja migran tanpa perlindungan yang berarti di bawah undang-undang perburuhan, membuat kontrak kerja seringkali menjadi satu-satunya mekanisme untuk menggambarkan dan menjamin hak serta kewajiban pekerja. Kontrak-kontrak ini, secara teori, harus dapat ditegakkan di pengadilan. Tetapi ketika pekerja migran ditolak mobilitasnya, paspor dan dokumen identitas mereka ditahan, mereka semakin tidak memiliki akses dan pengetahuan tentang bagaimana mencapai dan menggunakan mekanisme keadilan, yang pada akhirnya membuat kontrak menjadi alat hak-hak buruh yang sangat lemah. Oleh sebab itu, peninjauan hal tersebut ditinjau ulang dalam beberapa poin dalam SDG 8 (Gammage & Stevanovic, 2018).

Dan terakhir Encicas-Franco (2020) menjelaskan bahwa Filipina memiliki salah satu aliran emigrasi paling aktif di dunia. Remitansi migran menyumbang delapan hingga 10 persen dari *output* ekonomi, menjadikannya pendorong pertumbuhan

yang penting dalam beberapa tahun terakhir. Namun pandangan buruk masih sering diasumsikan bahwa pekerjaan rumah tangga perempuan, hiburan, atau pengantin pesanan di luar negeri jauh dari gagasan tradisional tentang kewanitaan Filipina. Hal inilah yang menimbulkan rasa malu nasional, terutama di kalangan kelas menengah dan atas. Namun, dengan argumen ini, bukan ekspor tenaga kerja perempuan yang diserang oleh argumen ini, tetapi jenis pekerjaan yang dilakukan perempuan yang memengaruhi citra negara. Kontradiktif inilah yang masih sering menjadi bumerang bagi pekerja migran perempuan, di sisi lain mereka membantu menghasilkan remitansi yang cukup besar untuk Filipina, namun perempuan dan tubuh mereka sering menjadi penanda batas untuk melestarikan norma-norma tradisional dan meredakan kepanikan moral dan rasa malu atas status mereka di luar negeri.

Setelah menjabarkan data-data di atas, peneliti mendeskripsikan mengenai isu pekerja migran perempuan Filipina dalam membantu pengentasan kemiskinan jika dilihat dari SDG 8 tujuan *decent work and economic growth*. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada poin 8.5 (mempromosikan lapangan kerja penuh dan produktif untuk semua, baik perempuan dan laki-laki) dan 8.8 (perlindungan hak-hak buruh dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya migran perempuan, dan mereka yang berada dalam pekerjaan tidak tetap).

Altruisme perempuan dalam konteks migrasi tenaga kerja Filipina sejalan dengan kepentingan fundamentalis agama Katolik setempat dalam mengakar cita-cita budaya “Filipina yang tidak mengeluh dan diam”. Melalui wacana altruisme perempuan yang sama, fundamentalis agama Katolik lokal membenarkan pembatasan kebebasan reproduksi di negara tersebut. Menjadi patuh membuat perempuan Filipina tidak hanya menjadi pekerja perawatan yang ideal di luar negeri, tetapi juga menghargai ibu, istri dan anak perempuan dalam masyarakat Filipina. Wacana nasionalis WMWs sebagai pahlawan menggarisbawahi bagaimana migran pekerja melayani negara dengan biaya pribadi yang besar untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Bentuk-bentuk pengakuan ini membangkitkan citra kemartiran yang menekankan kebajikan pengorbanan diri oleh para migran dan keluarga mereka demi ekonomi negara.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan demikian, masih banyak hak-hak kontradiktif yang masih butuh diperjuangkan untuk pekerja migran perempuan Filipina, terlepas dari semua pengorbanan masif yang telah dilakukan untuk negara mereka. Hal inilah yang akan dikaji peneliti lebih lanjut ditinjau dari konsep dan teori yang peneliti gunakan. Peninjauan SDG 8 juga dikaji secara langsung melalui poin 8.5 (pemerataan upah tanpa memandang gender) dan juga poin 8.8 (perlindungan hak-hak pekerja migran). Pemilihan periode antara tahun 2017-2019 peneliti pilih, karena pada periode tersebut terdapat kenaikan yang cukup signifikan dalam perkembangan remitansi pekerja migran perempuan Filipina. Hal inilah yang akan peneliti telusuri aspek-aspek apa saja yang membuat peningkatan remitansi dan mobilitas migrasi internasional yang terjadi di Filipina, lebih khusus yang terjadi kepada pekerja migran perempuan tersebut.

Sehingga dapat dirumuskan satu pertanyaan penelitian, yakni: **“Bagaimana upaya pengentasan kemiskinan oleh *Women Migrant Workers* (WMWs) Filipina ditinjau dari SDG 8 tujuan *decent work and economic growth*, terlebih khusus dalam poin hak dan perlindungan pekerja pada periode 2017-2019?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan-tujuan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.3.1 Praktis

Melalui penelitian ini, peneliti mendeskripsikan gambaran riil kepada para pembaca mengenai upaya-upaya apa saja yang dilakukan *Women Migrant Workers* (WMWs) di Filipina dalam upaya membantu pengentasan kemiskinan, apabila SDG 8 tujuan *decent work and economic growth* menjadi indikator penilaian dalam fenomena migrasi perempuan Filipina kali ini. Selain itu, pendeskripsian hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi data untuk penelitian selanjutnya, baik pustaka yang dijabarkan, informasi narasumber terkait, ataupun data laporan yang disajikan. Agar nantinya, fenomena ini tetap bersifat dinamis dengan perbandingan data penelitian ini dengan data terbaru di masa yang akan datang.

1.3.2 Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsi studi HI, terutama yang berhubungan dengan feminis dan migrasi, terutama dalam upaya pekerja migran perempuan Filipina dalam memberikan kesejahteraan. Signifikansi dari penelitian ini ialah mendeskripsikan bagaimana upaya yang diberikan WMWs Filipina selama periode yang dipilih sesuai, terutama dalam teori feminisme pasar dan interseksionalitas. Kemudian teori migrasi juga peneliti gunakan sebagai wadah dalam membahas fenomena ini, melalui aspek fungsionalis dan teori migrasi baru, di mana aspek utama migrasi adalah keluarga. *Compliance theory* juga digunakan sebagai jembatan antara kedua teori sebelumnya, apakah WMWs bersikap patuh atas dasar kelayakan atau pemikiran yang rasional. Dan terakhir, konsep *non-state actor* digunakan sebagai representasi WMWs dalam menjelaskan konsep pluralisme dalam bentuk sekumpulan individu. Selain itu, penelitian ini digunakan untuk memberikan kontribusi positif terhadap penelitian-penelitian dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional dalam bentuk penelitian deskriptif.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan bagaimana upaya pengentasan kemiskinan oleh *Women Migrant Workers* (WMWs) Filipina ditinjau dari SDG 8 tujuan *decent work and economic growth*, terlebih khusus dalam poin hak-hak pekerja pada periode 2017-2019. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi referensi ilmu untuk peneliti atau akademisi selanjutnya mengenai topik terkait. Data dan analisis yang dipaparkan dalam penelitian ini dapat memperkaya sumber data terkait topik-topik terkait, seperti gender, kemiskinan, dan migrasi internasional. Dan akhirnya, hasil penelitian ini menghasilkan analisis teori dan konsep yang digunakan, di mana SDG 8 menjadi indikator utama dalam melihat keberhasilan atau kegagalan fenomena ini.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang upaya WMWs Filipina dalam membantu mengentaskan kemiskinan di negara tersebut yang ditinjau melalui SDG 8. Penelitian-penelitian terdahulu juga dicantumkan dan diolah berdasarkan fokus-fokus dari isu ini, seperti isu gender, isu kemiskinan, serta isu migrasi dan pekerja migran dalam bentuk *literature review*. Bab ini juga tercantum rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian berupa tujuan praktis dan tujuan teoretis, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan guna memberikan gambaran terhadap setiap bab yang dikaji oleh peneliti.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Menjelaskan mengenai teori dan konsep apa yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji permasalahan ini. Dalam kesempatan kali ini digunakan Teori Feminisme Ekonomi Politik Internasional, Teori Migrasi Internasional, *Compliance Theory* dan juga Konsep Aktor Non-Negara (Sekumpulan Individu). Peneliti berfokus pada konsepsi yang terkait dengan gender dan migrasi dari pemikiran-pemikiran para ahli yang sesuai dengan kategori yang sesuai dengan topik peneliti. Kesenambungan pemikiran pro dan kontra inilah yang akan menjadi fokus baru dalam mengkaji topik pekerja migran perempuan dalam ruang lingkup SDG 8. Untuk mempermudah penelusuran kasus ini, peneliti juga menyiapkan kerangka pemikiran yang sudah disusun dan tertera dalam bab ini.

BAB III: Metode Penelitian

Menjelaskan mengenai berbagai alur terkait metodologi penelitian. Untuk objek penelitian sendiri, peneliti menggunakan *Women Migrant Workers* (WMWs) dalam upaya membantu pengentasan kemiskinan di Filipina melalui peninjauan SDG 8 pada periode 2017-2019. Penelitian ini berjalan sesuai dengan kaidah penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengolahan dalam lingkup kualitatif pula. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pola analisisnya pun dilakukan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data peneliti lakukan melalui dua cara, yakni studi pustaka (dalam bentuk *literature review* dan *internet based research*) dan wawancara *in-depth*. Sumber data pun dibagi menjadi primer (laman resmi dan hasil wawancara) dan sekunder (jurnal ilmiah dan *website* pendukung). Teknik analisis data yang digunakan peneliti ialah milik Miles dan Huberman,

yakni *data reduction*, *data display*, *conclusion drawing and verification*. Dan terakhir tercantum *timeline* perencanaan pengerjaan penelitian ini.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menjelaskan mengenai hasil analisis terhadap data-data yang sudah dikumpulkan. Dalam bab ini, dijelaskan lebih rinci terkait perkembangan kesetaraan gender yang ada di Filipina. Kesetaraan gender inilah yang nantinya berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan masyarakat di Filipina, di mana masih terpatri di dalam pemikiran masyarakat Filipina, hanya laki-laki yang boleh bekerja dan mendapatkan upah yang sesuai. Namun, kemudian dibahas pula mengenai bukti-bukti keberhasilan migrasi WMWs dalam membantu pengentasan kemiskinan di Filipina, sebagai pembuktian *gender equality* merupakan hal yang penting di Filipina mengenai pembangunan negara tersebut, lebih khusus pada periode 2017-2019. Dan juga di dalam bab ini, peneliti menganalisis semua data yang ada sesuai dengan teori dan konsep yang digunakan dalam tinjauan pustaka. Analisis ini akan lebih khusus difokuskan dengan SDG 8, di mana peneliti mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana hubungan timbal balik yang diterima oleh WMWs dalam penyumbangan remitansi mereka untuk Filipina. Hak dan perlindungan apa saja yang sudah ataupun belum mereka terima sesuai dengan tinjauan SDG 8 poin 8.5 dan poin 8.8.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Menjelaskan mengenai hasil akhir secara deskriptif dan secara singkat terkait topik penelitian. Peneliti memberikan *statement* akhir dari penelitian ini, di mana akan dijabarkan mengenai pembuktian terakhir dari topik penelitian ini, apakah bersifat pro ataupun kontra terhadap kasus yang diangkat. Selain itu, dalam kesimpulan, peneliti juga menyederhanakan pembahasan-pembahasan inti dari semua bab yang sudah dibahas, sehingga memudahkan peneliti dan pembaca untuk menemukan titik akhir dari penelitian ini. Dalam poin saran, peneliti juga menyampaikan beberapa rekomendasi terkait hal ini, agar peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih lanjut kekurangan dari yang belum tersampaikan. Saran-saran ini akan dibuat secara praktis dan teoretis, agar dapat dijadikan pedoman awal untuk

peneliti selanjutnya, baik diteruskan ataupun dibuat baru sesuai dengan kebutuhan mengenai pengkajian topik terkait.